



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : HERWINTARTI
NIK : 1971036302750001
Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Kerja : BADAN KARANTINA PERTANIAN
Sub Unit Kerja : BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKAL
PINANG
Jabatan : KEPALA BALAI
Jenis Laporan : Periodik - 2022
Tanggal Kirim : 10 Januari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN KARANTINA PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERWINTARTI
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 198794

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 420.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 216 m2 di KAB / KOTA KOTA PANGKALPINANG, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 147 m2/36 m2 di KAB / KOTA BANGKA TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 200.500.000

1. MOBIL, INOVA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 35.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 416.216.112

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.071.716.112

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.071.716.112

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.